



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT PRESIDEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DENI MULYANA
2. Jabatan : KEPALA ISTANA KEPRESIDENAN YOGYAKARTA
3. NHK : 845555

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/90 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 135 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m²/25 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 340.000.000

1. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.599.196**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 135.501.670**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.850.100.866



III. HUTANG

Rp. 18.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.832.100.866

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.